

Professional, Global,
Entrepreneurship



RENCANA INDUK PENGEMBANGAN

**FAKULTAS KEGURUAN DAN
ILMU PENDIDIKAN
UM BUTON**

2019-2038



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BUTON
NOMOR: 27 TAHUN 1441 H/2020 M**

**TENTANG
RENCANA INDUK PENGEMBANGAN
LINGKUP FKIP
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BUTON
TAHUN 2019-2023**

Bismillahirrahmanirrahim

Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Buton :

Menimbang : a. Bahwa untuk pelaksanaan Rip Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Lingkup Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Buton Tahun Akademik 2019-2023 diperlukan rencana pengembangan yang jelas dan terukur.
b. Untuk keperluan sebagaimana butir a, perlu disusun Rencana induk pengembangan yang disesuaikan dengan perkembangan dan peraturan yang berlaku dengan surat Keputusan Dekan.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Surat Keputusan Mendiknas Nomor 81/D/0/2001
3. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/2012, tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
4. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 178/KET/I.3/D/2012 tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah;
5. Surat Keputusan Majelis DIKT1LITBANG Nomor 0217/kep/l_3/d/2019 tanggal 27 November 2019 tentang Rencana Induk Pengembangan UM. Buton 2019- 2036.
6. Statuta Universitas Muhammadiyah Buton Tahun 2019;
7. Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Buton Nomor 166 Tahun 2019 M/1440 H tentang penetapan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Buton masa Jabatan 2019-2023.

Memperhatikan: Hasil Rapat Senat tanggal 12 Februari 2019 tentang Penetapan Rencana Induk Pengembangan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Buton.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: Surat Keputusan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Tentang Penetapan RIP Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Buton Tahun 2019-2038

- Pertama : Menyatakan berlakunya Rencana Induk Pengembangan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Buton Tahun 2019-2038;
Kedua : Dengan berlakunya Surat keputusan ini maka Rencana Induk Pengembangan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Buton sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi;
Ketiga : Menugaskan kepada seluruh pejabat struktural di Lingkup Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan untuk mensosialisasikan dan melaksanakan Rencana Induk Pengembangan ini di lingkup Kerja masing-masing.

Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Baubau

Pada tanggal : 2 Sha'ban 1441 H
26 Maret 2020 M


Dekan
Gawise, S.Pd., M.Pd.
NIDN. 0931127101

Tembusan kepada Yth:

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Buton di Baubau
2. Kepala BAAK Universitas Muhammadiyah Buton di Baubau
3. Wakil Dekan Lingkup FKIP
4. Masing-Masing Dosen Prodi
5. Arsip.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan selalu mengharapkan rahmat dan hidayah Allah SWT, serta salam dan shalawat senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, dan semoga segala aktifitas keseharian kita senantiasa bernilai ibadah di hadapan Sang Pemilik Ilmu, Allah SWT.

Alhamdulillahil'alamin, atas segala petunjuk, kesempatan, dan izin dari Allah SWT sehingga Tim Penyusun dapat menyelesaikan amanah yang diberikan oleh institusi untuk menyelesaikan dokumen Rencana Induk Pengembangan Fakultas Muhammadiyah (RIP UM) Buton 2019-2038.

Kurang lebih 18 tahun usia UPPS-KIP sebagai salah satu Amal Usaha Persyarikatan Muhammadiyah dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi di Indonesia telah berhasil memberikan kontribusi yang tidak sedikit bagi kemajuan pembangunan daerah dan nasional. Meski disadari, di usianya tersebut masih banyak hal yang harus dikerjakan dan belum tercapai.

Keberadaan Dokumen RIP UPPS-KIP ini diharapkan dapat menjadi Bintang Penuntun Arah (*Leitstar*) bagi seluruh sivitas akademika untuk mewujudkan Visi UPPS-KIP Menjadi Fakultas Unggul Berbasis Kemaritiman, berjiwa Entrepreneurship yang Berkarakter Islami dan Berdaya Saing Global. *Man Jadda Wa Jada*, untuk mewujudkan mimpi besar tersebut, dibutuhkan komitmen yang kuat dari seluruh sivitas akademika UPPS-KIP untuk melaksanakan apa yang telah digariskan dalam RIP yang selanjutnya akan dijabarkan ke dalam rencana strategis (*Strategic Plan*) lima tahunan.

Akhir kata, ucapan terima kasih kami ucapkan kepada seluruh tim penyusun dokumen RIP UPPS-KIP Tahun 2019-2038 yang telah menyedekahkan waktu, energi, dan pikirannya dalam penyusunan dokumen ini sehingga tersaji dengan baik untuk perubahan ke arah yang lebih baik bagi amal usaha ini, semoga Allah SWT membalas kerja keras ini dengan keridhaan-Nya, Aamiin.

Nashrun Minallah wa Fathun Qoriib

Baubau, November 2019

Dekan,

Gawise, S.Pd., M.Pd.

DAFTAR ISI

Halaman Sampul.....	i
Surat Keputusan Senat UPPS-KIP	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
Daftar Gambar	v
Daftar Tabel.....	vi
Daftar Grafik	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1-5
A. Lata Belakang.....	1
B. Dasar Hukum.....	3
C. Sistematika Penulisan	4
BAB II PROFIL FKIP UM BUTON	5-13
A. Sejarah Singkat	5
B. Nilai Dasar	10
C. Visi	11
D. Misi.....	11
E. Tujuan.....	12
F. Sasaran.....	12
BAB III ANALISIS SITUASI DAN ISU STRATEGIS.....	14-20
A. Situasi Internal	14
B. Situasi Eksternal	19
BAB IV ARAH PENGEMBANGAN (ROAD MAP)	21-25
A. Skenario Perencanaan.....	21
B. Arah Pengembangan	24
BAB V STRATEGI DASAR, KEBIJAKAN DASAR DAN INDIKATOR KINERJA.....	26-80
A. Bidang Tata Pamong, Tata Kelola & Kerjasama	26
B. Bidang Mahasiswa	37
C. Bidang Sumber Daya Manusia	43
D. Bidang Keuangan, Sarana dan Prasarana	47

E. Bidang Pendidikan.....	56
F. Bidang Penelitian.....	61
G. Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat.....	64
H. Bidang Luaran dan Capaian Caturdarma	68
 BAB VI PENUTUP	 81

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Arah Pengembangan UPPS-KIP Tahun 2019-2038	21
--	----

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Peringkat Akreditasi Program Studi UPPS-KIP	8
Tabel 2. Sasaran dan Target Capaian UPPS-KIP Tahun 2019-2038.....	22

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. Sebaran Mahasiswa UPPS-KIP menurut Program Studi 3 tahun terakhir	9
---	---

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rencana Induk Pengembangan (RIP) ini merupakan rencana pengembangan Fakultas Muhammadiyah Buton (UPPS-KIP) untuk periode 2019-2038. RIP merupakan kerangka acuan dalam penyelenggaraan Caturdarma Perguruan Tinggi yang memuat arahan dan capaian serta tolok ukur keberhasilan yang berazaskan kepada kebenaran ilmiah, penalaran, kejujuran, keadilan, manfaat, kebijakan, tanggung jawab, kebhinekaan, dan keterjangkauan. Walau RIP bersifat umum, namun menjadi dasar pijakan dalam penyusunan rencana-rencana operasional, rencana strategis pada tingkat fakultas, program studi, lembaga, biro, Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan unit satuan pelaksana akademik di lingkungan Fakultas Muhammadiyah Buton. RIP ini disusun berdasarkan usulan dari seluruh pemangku kepentingan di UPPS-KIP untuk mewujudkan Visi, Misi Fakultas yang merupakan komitmen bersama tentang kondisi ideal masa depan yang ingin dicapai dalam 20 (dua puluh) tahun ke depan dengan mempertimbangkan potensi yang dimiliki, permasalahan yang dihadapi dan berbagai kecenderungan yang sedang dan akan berlangsung. Berdasarkan visi-misi tersebut, selanjutnya dirumuskan berbagai tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Berdasarkan tujuan dan sasaran tersebut, selanjutnya dirumuskan skenario untuk mencapainya. Skenario yang dimaksud meliputi strategi dan program pengembangan yang perlu ditempuh, beserta indikator-indikator keberhasilannya. RIP tersebut dimulai pada tahun 2019, UPPS-KIP telah mampu mencapai peningkatan kolaborasi, daya saing kompetitif, dan daya saing komparatif serta unggul di wilayah Sulawesi Tenggara, dalam kegiatan Caturdarma (bidang pendidikan dan pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta Al-Islam dan Kemuhammadiyahan). Keberhasilan mencapai idaman-idaman perlu diukur dan pengukurannya diwujudkan dalam bentuk sasaran startegi.

Era kompetisi Pendidikan Tinggi baik Perguruan Tinggi Negeri (PTN), Perguruan Tinggi Swasta (PTS), Perguruan Tinggi Muhammadiyah/'Aisyiyah

(PTMA) maupun Perguruan Tinggi Asing (PTA) semakin ketat dan tajam serta

melampaui batas geografis. Perguruan Tinggi yang tidak mampu bersaing secara terbuka akan tumbang terseleksi oleh keadaan. Oleh karena itu, jika suatu perguruan tinggi ingin tetap *survive* maka harus mampu menyusun perencanaan strategis yang dapat menjawab permasalahan dan menghadapi tantangan global sekaligus mampu memenuhi kebutuhan pasar. Titik berat Renstra pengembangan Fakultas ini adalah aspek-aspek strategis dalam penyelenggaraan dan pengembangan Fakultas. Aspek-aspek strategis yang dimaksud meliputi peningkatan tata kelola sistem pendidikan, pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta mencapai tingkat efektifitas dan efisiensi organisasi, rancangan kampus Islami sebagai lingkungan kampus kondusif Islami serta peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia dengan tujuan akhir unggul di Sulawesi Tenggara.

RIP ini bukanlah merupakan pedoman yang statis, melainkan dinamis. Artinya, rencana tersebut dapat ditinjau ulang secara periodik, setiap setahun sekali. Peninjauan rencana juga dapat dilakukan sesuai dengan perubahan-perubahan penting yang diperkirakan berpengaruh secara signifikan terhadap penyelenggaraan dan pengembangan Fakultas. Namun demikian, RIP ini tidak berarti sekedar sebuah dokumen, apalagi sekedar untuk memenuhi kepentingan praktis atau semacam kelengkapan administratif untuk akreditasi. Rencana Induk pengembangan ini disusun berdasarkan kesadaran, kehendak, dan kebutuhan bersama untuk dijadikan sebuah pedoman bagi penyelenggaraan dan pengembangan Fakultas, agar setiap keputusan yang diambil dan setiap langkah yang ditempuh oleh setiap elemen pada setiap level merupakan bagian dari upaya untuk menuju tujuan bersama yang sudah ditetapkan. Sebagai pedoman penyelenggaraan dan pengembangan Fakultas, RIP ini harus menjadi komitmen bersama seluruh elemen penyelenggara Fakultas. Oleh karena itu, dokumen ini setelah melalui pertimbangan Senat Fakultas yang merupakan representasi dari unsur-unsur penyelenggaraan Fakultas dan ditetapkan melalui surat keputusan Majelis Pendidikan Tinggi dan Litbang PP Muhammadiyah.

Sebagai pedoman penyelenggaraan dan pengembangan Fakultas, RIP ini perlu dijabarkan dalam berbagai dokumen perencanaan strategis yang lebih

operasional. Dokumen perencanaan operasional yang dimaksud adalah Rencana Strategis ditingkat unit, Rencana Tindakan (*Action Plan*) per bidang, dan berbagai peraturan penyelenggaraan Fakultas.

Menghadapi kondisi tersebut, UPPS-KIP sebagai salah satu lembaga yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dituntut mengikuti perubahan. Salah satu upaya untuk mengikuti perubahan tersebut, pada tahun 2019 telah dirumuskan Rencana Induk Pengembangan (RIP) periode tahun 2019–2038, dengan menetapkan empat tahap pengembangan (*Grand Strategy*) yaitu:

Periode 2019-2023: Tahap Peningkatan Akses dan sumberdaya manusia

Periode 2024-2028: Tahap Peningkatan kualitas caturdarma

Periode 2029-2033: Tahap Pusat Unggulan Pendidikan dan Keguruan Indonesia

Periode 2034-2038: Tahap Pusat Unggulan Pendidikan dan Keguruan Dunia

Penetapan tahap pengembangan ini mengacu pada periodisasi evaluasi kinerja dan rotasi kepemimpinan setiap 4 Tahun yang berlaku di lingkup Fakultas Muhammadiyah Buton. Selain itu tahapan ini juga merupakan representasi evaluasi dalam membaca dan menjawab tantangan perubahan di masa depan. Dengan begitu, dokumen RIP dapat menjadi muatan normatif yang menjadi tuntutan arah pengembangan institusi untuk mencapai kondisi idealnya.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen
5. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Permenpan Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya

8. Pedoman PP Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.O/B/2012 Tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
9. Ketentuan Majelis Dikti PP Muhammadiyah Nomor 178/KET/I.3/2012 Tentang Penjabaran Pedoman PP Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.O/B/2012 Tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah PP Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.O/B/2012 Tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
10. Statuta UM. Buton Tahun 2019.

C. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Induk Pengembangan (RIP) Fakultas Muhammadiyah Buton 2019–2038 adalah sebagai berikut :

BAB I: PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Dasar Hukum
- C. Sistematika Penulisan

BAB II: PROFIL FAKULTAS-KIP UM BUTON

- A. Sejarah Singkat
- B. Nilai Dasar
- C. Visi
- D. Misi
- E. Tujuan
- F. Sasaran

BAB III: ANALISIS SITUASI INTERNAL DAN EKSTERNAL

- A. Situasi Internal
- B. Situasi Eksternal

BAB IV: ARAH PENGEMBANGAN (*ROAD MAP*)

- A. Skenario Perencanaan
- B. Arah Pengembangan

BAB V: STRATEGI DASAR, KEBIJAKAN DASAR, DAN INDIKATOR KINERJA

- A. Bidang Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama.
- B. Bidang Mahasiswa
- C. Bidang Sumber Daya Manusia
- D. Bidang Keuangan, Sarana dan Prasarana
- E. Bidang Pendidikan
- F. Bidang Penelitian
- G. Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat
- H. Bidang Luaran dan Capaian Caturdarma

BAB VI: PENUTUP

BAB II

PROFIL UPPS KIP UM BUTON

A. Sejarah Singkat

Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 memberikan perhatian khusus pada amanat otonomi daerah dalam pembangunan kualitas masyarakat melalui sektor pendidikan, termasuk pendidikan tinggi. Sumber daya manusia (SDM) berkualitas diperlukan daerah untuk memberikan dukungan pada tata kelola manajemen pembangunan daerah yang optimal serta sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi daerah.

Eksistensi Muhammadiyah dalam pengembangan kualitas sumberdaya manusia Indonesia adalah misi amal usahanya, termasuk dalam pengembangan SDM Kabupaten Buton saat itu (sebelum dimekarkan menjadi beberapa daerah otonom). Disisi lain, pertumbuhan jumlah dan lulusan SMU/MA/SMK yang akan melanjutkan ke pendidikan tinggi cukup besar namun perguruan tinggi khusus di wilayah kabupaten buton saat itu belum ada. Muhammadiyah turut serta memberikan kontribusi atas kondisi tersebut, yakni dengan pendirian dan pengembangan suatu Fakultas menjadi sangat esensial dan mendesak. Perhatian tentang ini juga pada hasil kajian dan observasi yang memberikan gambaran kebutuhan daerah pada kompetensi SDM dalam disiplin ilmu tertentu, serta kemampuan SDM daerah dalam menjawab tantangan perubahan yang begitu cepat dan membutuhkan daya dukung SDA dan SDM yang berkualitas.

Berkenaan dengan itu, para Tokoh Muhammadiyah Daerah Kabupaten Buton saat itu, setelah mencermati kondisi tersebut di atas merasa tergugah dan terpanggil untuk mengkaji pendirian Perguruan Tinggi. *Alhamdulillah* berkat rahmat Allah SWT dan sadar akan tanggungjawab untuk menyukseskan

pembangunan nasional melalui sektor pendidikan, maka Badan Pendiri Fakultas Islam Buton pada tahun 1999 membentuk Perguruan Tinggi yang bernama Fakultas Islam Buton (UNISBU).

Pada tahun yang sama tepatnya tanggal 3 Desember 1999 diadakan rapat koordinasi Badan Pendiri UNISBU yang kemudian disepakati bahwa UNISBU

berubah menjadi amal usaha milik Muhammadiyah dengan nama Fakultas Muhammadiyah Buton. Pada tanggal 17 Februari 2000 Pimpinan Daerah Muhammadiyah Buton membentuk dan menetapkan Badan Pemrakarsa Pendirian Fakultas Muhammadiyah Buton yang bertugas untuk merencanakan, menyiapkan dan menyusun segala hal yang berkaitan dengan legalitas berdirinya Fakultas Muhammadiyah Buton.

Setelah melalui perjuangan yang panjang akhirnya Menteri Pendidikan Nasional RI mengeluarkan Surat Keputusan No. 81/D/O/2001 Tentang Izin Operasional Fakultas Muhammadiyah Buton, bersamaan dengan Surat Izin Operasional itu juga terdaftar 3 Program Studi di FKIP yaitu Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar (D2), Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia (S1), dan Program Studi Bimbingan dan Konseling (S1) serta memberikan kesempatan selama satu tahun kepada Fakultas Muhammadiyah Buton untuk mengusulkan program studi lainnya.

Sejarah berdirinya program studi pada Fakultas Muhammadiyah Buton sebagai berikut :

1. Tahun 2001 dengan izin operasional SK Menteri Pendidikan Nasional Nomor 81/D/O/2001 Tanggal 10 Juli 2001 Tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program-Program Studi dan Pendirian Fakultas Muhammadiyah Buton yang Diselenggarakan Oleh BPH Fakultas Muhammadiyah di Buton.
 - Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia (S1)
 - Program Studi Bimbingan dan Konseling(S1)
 - Program Studi PGSD Diploma II yang ditingkatkan menjadi PGSD S1 dengan SK Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 114/D/O/2010 tanggal 6 Agustus 2010 tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Program Studi PGSD (S1) Peningkatan dari Program Studi PGSD (DII) pada Fakultas Muhammadiyah Buton.
2. Tahun 2003 dengan izin operasional SK Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor Di.II/565/2003 tanggal 30 Desember 2003 Tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Agama Islam dan

Program Studi *Ahwal Al-Syakhsiyah* Program Sarjana Fakultas Agama Islam Fakultas Muhammadiyah Buton.

- Program Studi Pendidikan Agama Islam (S1)
 - Program Studi *Ahwal Al-Syakhsiyah* (S1).
3. Tahun 2004 dengan Izin operasional SK Koordinator Kopertais Wilayah VIII Nomor 003 Tahun 2004 tanggal 6 Mei 2004 tentang Izin Penyelenggaraan Program Diploma II Pendidikan Guru Sekolah Dasar Islam/Madrasah Ibtidaiyah (PGSDI/MI) dan Pendidikan Guru Pendidikan Agama Islam (PGPAI) Fakultas Agama Islam Fakultas Muhammadiyah Buton. Program Studi PGSDI/MI DII dan PGPAI ditutup pada tahun 2006.
 4. Tahun 2006 dengan izin operasional Surat Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 3962/D/T/2006 tanggal 19 Oktober 2006 Perihal Ijin Penyelenggaraan Program-Program Studi baru pada Fakultas Muhammadiyah Buton.
 - Program Studi Ilmu Pemerintahan (S1)
 - Program Studi Teknik Sipil (S1)
 - Program Studi Ilmu Hukum (S1)
 - Program Studi Akuntansi (S1)
 - Program Studi Pertanian Peminatan Sosek Pertanian (S1). Berubah menjadi Program Studi Agroteknologi (SK Kopertis Wil. IX Sulawesi No. 1418/D/T/K-IX/2009) kemudian berubah lagi menjadi Program Studi Agribisnis (SK Kopertis Wil. IX Sulawesi No. 2127/009/KL/2009).
 5. Tahun 2015 dengan izin operasional SK Menteri Ristekdikti RI Nomor 60/M/Kp/III/2015 Tentang Pembukaan Program Studi S1 Pendidikan Biologi pada Fakultas Muhammadiyah Buton.
 6. Tahun 2016 dengan izin operasional SK Menteri Ristekdikti RI Nomor 259/KPT/I/2016 tanggal 29 Agustus 2016 Tentang Pembukaan Program Studi S1 Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini pada Fakultas Muhammadiyah Buton.

7. Tahun 2017 dengan izin operasional SK Menteri Ristekdikti RI Nomor 552/KPT/I/2017 tanggal 2 Oktober 2017 Tentang Izin Pembukaan Program Studi S1 Ilmu Komunikasi pada Fakultas Muhammadiyah Buton.
8. Tahun 2018 dengan izin operasional SK Menteri Ristekdikti RI Nomor 426/KPT/I/2018 tanggal 9 Mei 2018 Tentang Izin Pembukaan Program Studi S1 Manajemen pada Fakultas Muhammadiyah Buton.
9. Tahun 2019 dengan izin operasional SK Menteri Ristekdikti RI Nomor 539/KPT/I/2019 tanggal 11 Juli 2019 Tentang Izin Pembukaan Program Studi S1 Pengelolaan Sumberdaya Perairan pada Fakultas Muhammadiyah Buton.

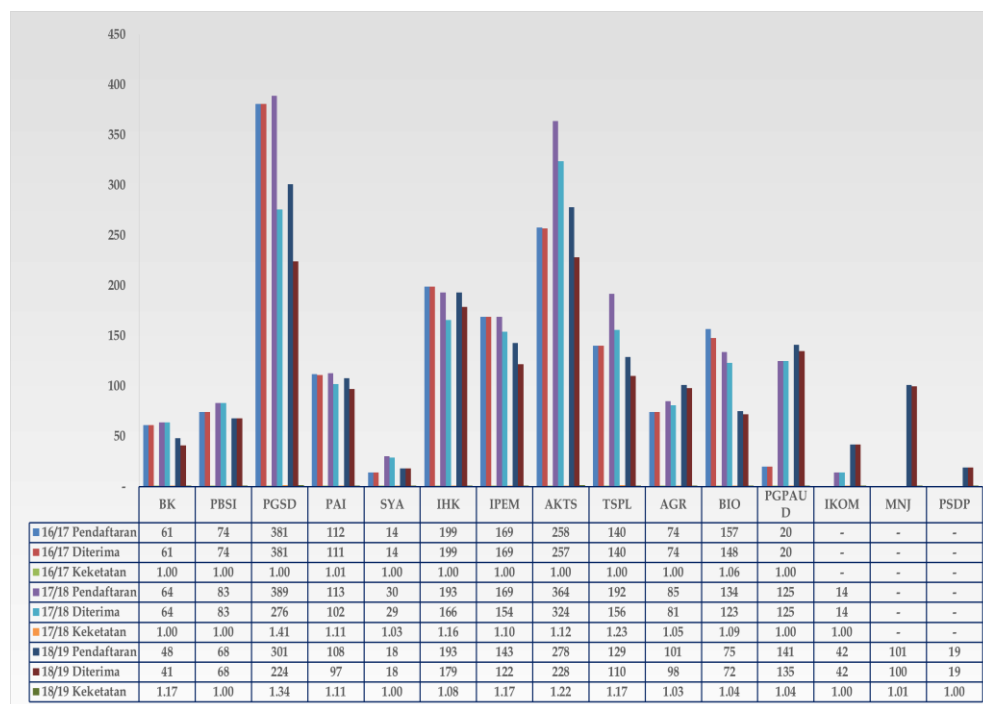
**Tabel 1. Peringkat Akreditasi Program Studi UPPS-KIP
(menurut data tahun 2019)**

No	Program Studi	Peringkat Akreditasi	SK Akreditasi	Masa Berlaku Akreditasi
1.	Bimbingan dan Konseling	B	478/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2014	21/12/2019
2.	Pend. Bahasa dan Sastra Indonesia	B	4619/SK/BAN-PT/Akred/ S/XII/2017	05/12/2022
3.	PGSD	C	1346/SK/BAN-PT/Ak-XVI /S/V/2018	21/05/2023
4.	Pendidikan Agama Islam	B	1151/SK/BAN-PT/Akred/ S/XI/2015	14/11/2020
5.	Ahwal Asyaksyah	B	0241/SK/BAN-PT/Akred/ S/I/2017	10/1/2022
6.	Ilmu Hukum	B	1262/SK/BAN-PT/Akred/ S/XII/2015	29/12/2020
7.	Ilmu Pemerintahan	B	2890/SK/BAN-PT/Akred/ S/XII/2016	01/12/2021
8.	Akuntansi	C	2966/SK/BAN-PT/Akred/ S/XII/2016	01/12/2021
9.	Teknik Sipil	C	3262/SK/BAN-PT/Akred/ S/XII/2016	27/12/2021
10.	Agribisnis	B	1152/SK/BAN-PT/Akred/ S/IV/2017	18/04/2022
11.	Pendidikan Biologi	C	5000/SK/BAN-PT/Akred/ S/X/2017	27/12/2022

12.	PG- PAUD	Terakredita- tasi Minimal	SK Kemenristek Dikti No. 259/KPT/I/2016 Tanggal 29 Agustus 2016	-
13.	Ilmu Komunikasi	Terakredita- tasi Minimal	SK Kemenristek Dikti No. 252/KPT/I/2017 Tanggal 20 Oktober 2017	-
14.	Manajemen	Terakredita- tasi Minimal	SK Kemenristek Dikti No. 426/KPT/I/2018 Tanggal 09 Mei 2018	-
15.	Pengelolaan Sumber Daya Perairan	Terakredita- tasi Minimal	SK Kemenristek Dikti No. 539/KPT/I/2019 Tanggal 11 Juli 2019	-

Sedangkan pencapaian Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi yang dicapai oleh Fakultas Muhammadiyah Buton terakreditasi C dengan Surat Keputusan BAN PT Nomor 4062/SK/BAN-PT/Akred/PT/X/2017.

Pada pertengahan tahun 2019 Fakultas Muhammadiyah Buton telah memiliki 7 Fakultas dengan 15 Program Studi yang keseluruhannya merupakan program Sarjana serta mahasiswa aktif sebanyak 5.542 mahasiswa. Untuk sebaran mahasiswa tiap program studi (*student body*) pada tiga tahun terakhir disajikan pada grafik berikut:



Grafik 1. Sebaran Mahasiswa UPPS-KIP menurut Program Studi 3 Tahun terakhir (*Sumber: BAAK UPPS-KIP, 2019*)

Data menunjukkan bahwa dalam tiga tahun terakhir, sebaran mahasiswa UPPS-KIP terbanyak adalah pada program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) sebanyak 1.102 Mahasiswa, sedangkan jumlah mahasiswa terendah adalah pada Program Studi Pengelolaan Sumberdaya Perairan (PSDP) dengan jumlah sebanyak 19 Orang. Hal ini disebabkan karena program studi PSDP adalah program studi baru yang mulai berlaku ijin operasionalnya pada Juni 2019.

Sejarah kepemimpinan di Fakultas Muhammadiyah Buton, dalam perjalanannya telah mengalami 4 masa kepemimpinan Rektor yaitu :

1. Drs. H. Andi Muh. Syahir Baso, S.H., M.H., Rektor Fakultas Muhammadiyah Buton Periode 2000-2008.
2. Dr. H. Syarifuddin Bone, Drs., S.H., M.Si., M.H., Rektor Fakultas Muhammadiyah Buton Periode 2008-2014.
3. Dr. Suriadi, S.P., M.M., Rektor Fakultas Muhammadiyah Buton Periode 2014 - 2018.
4. Dr. Wa Ode Al Zarliani, S.P., M.M., Rektor Fakultas Muhammadiyah Buton Periode 2018 - 2022.

Sejalan dengan tujuan pendidikan nasional sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Fakultas Muhammadiyah Buton didirikan dengan tujuan menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat beriman dan bertakwa terhadap Allah SWT, berakhlak mulia, percaya pada diri sendiri, memiliki kemampuan akademik dan/atau menciptakan teori-teori baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, serta mengupayakan pemanfaatannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan kesejahteraan umat manusia.

B. Nilai Dasar

Sebagai bagian dari amal usaha Persyarikatan Muhammadiyah yang bergerak di bidang kesejahteraan, pendidikan dan sosial Fakultas Muhammadiyah bertekad menjadikan diri sebagai “pengembangan jiwa, semangat, dan kompetensi pembangunan dalam bidang pendidikan dengan semangat pengabdian” sebagai filosofi penyelenggaraan institusi pengembangan pendidikan tinggi. Penyelenggaraan dan pengembangan berusaha

mengintegrasikan nilai-nilai profesional keilmuan dan budaya sehingga mampu menumbuhkan kepribadian yang menguasai ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang dijiwai oleh nilai-nilai budaya dan semangat pengabdian. Nilai dasar Fakultas Muhammadiyah Buton adalah Profesional, Global, *Entrepreneurship*, Unggul dan Islami.

1. Profesional:

Memiliki Sumber Daya Manusia yang berkualitas, tata kelola perguruan tinggi yang baik (*Good University Governance*) serta menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidangnya, baik dalam aspek ilmu pengetahuan, sikap maupun keterampilan.

2. Global :

Memiliki sumber daya manusia dan lulusan yang mampu bersaing secara global.

3. Entrepreneurship:

Kemampuan untuk mengenali, mengidentifikasi potensi, mengembangkan atau berinovasi, menciptakan nilai tambah agar dapat berkontribusi positif bagi pembangunan bangsa dan umat manusia.

4. Unggul:

Memiliki keunggulan lulusan berjiwa *entrepreneurship* yang bersendikan nilai-nilai keislaman dan berbasis kearifan lokal.

5. Islami:

Nilai-nilai Islami yang menjadi dasar sivitas akademika yang terimplementasi pada setiap kegiatan akademik dan non akademik.

C. Visi

Visi Fakultas Muhammadiyah Buton adalah *“Menjadi Fakultas Unggul Berbasis Kemaritiman, berjiwa Entrepreneurship yang Berkarakter Islami dan Berdaya Saing Global”*.

D. Misi

Misi Fakultas Muhammadiyah Buton adalah sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran yang profesional berbasis kemaritiman dan berjiwa *Entrepreneurship*;

2. Menyelenggarakan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat berbasis kemaritiman dan berjiwa *Entrepreneurship* yang berkontribusi terhadap pengembangan IPTEKS dan pembangunan masyarakat yang berkelanjutan;
3. Menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi yang Islami dengan prinsip *Good University Governance*;
4. Mengembangkan AI Islam dan Kemuhammadiyah, dan kerjasama dengan perguruan tinggi lain, pemerintah, dan swasta pada tingkat nasional dan internasional dalam mewujudkan Caturdarma PTMA.

E. Tujuan

1. Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi berbasis kemaritiman, berjiwa *enterpreneursip*, dan berkarakter Islami;
2. Terwujudnya penelitian dan publikasi yang berkontribusi terhadap pengembangan IPTEKS serta produk pengabdian kepada masyarakat yang berbasis riset dan inovatif;
3. Terwujudnya tata kelola perguruan tinggi yang Islami dengan prinsip *Good University Governance*;
4. Terlaksananya nilai-nilai AIK dalam kehidupan kampus, meningkatnya kerjasama dengan perguruan tinggi lain, pemerintah, dan swasta pada tingkat nasional dan internasional dalam mewujudkan Caturdarma PTMA.

F. Sasaran

1. Terwujudnya pendidikan dan pengajaran yang berkualitas didukung oleh penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi berbasis kemaritiman, berjiwa *entrepreneurship* dan berkarakter Islami serta berdaya saing global;
2. Terwujudnya mahasiswa yang berjiwa *Entrepreneurship* dan berkarakter Islami yang berkontribusi pada pembangunan masyarakat maritim;
3. Menghasilkan penelitian dan publikasi yang berkontribusi terhadap pengembangan IPTEKS;

4. Menghasilkan produk pengabdian kepada masyarakat dan Publikasi yang berbasis riset dan inovatif serta berkontribusi pada pembangunan masyarakat maritim;
5. Tercapainya peningkatan mutu tata kelola (*good university governance*) dalam sitem manajemen institusi;
6. Terwujudnya tata kelola keuangan Fakultas yang sesuai standar *good university governance*, sumber daya manusia yang berkualitas dan berkarakter Islami, dan tercapainya kemandirian sumber-sumber pendapatan Fakultas untuk mendukung pelaksanaan Caturdarma secara konsisten dan berkelanjutan;
7. Terwujudnya nilai-nilai AIK dalam kehidupan sivitas akademik dan kerjasama yang saling menguntungkan dengan berbagai pihak dalam mewujudkan Caturdarma Perguruan Tinggi yang berkualitas dan berdaya saing global.

BAB III

ANALISIS SITUASI INTERNAL DAN EKSTERNAL

Analisis situasi dilakukan menggunakan analisis SWOT yang mencakup dua situasi, yakni situasi Internal (kekuatan dan Kelemahan), dan situasi Eksternal (peluang dan ancaman). Indikator-indikator yang digunakan dalam analisis ini adalah: Tata Kelola Fakultas, Pendidikan, Lingkungan Akademik, Manajemen Internal, *Income Generating*, dan Sarana dan Prasarana.

A. Situasi Internal

1. Tata Kelola Fakultas

Kekuatan.

Kuatnya komitmen UPPS-KIP sebagai bagian dari amal usaha Persyarikatan Muhammadiyah untuk menerapkan tata kelola Fakultas berbasis *Good University Governance* (GUG), baik pada tataran manajemen kepemimpinan organisasi, tata kelola sumber daya keuangan, peningkatan sumber daya manusia, dan pengembangan sarana dan prasarana yang menunjang pelaksanaan kegiatan Caturdarma.

Kelemahan.

Akibat dari konflik internal di masa lalu yang berkepanjangan mengakibatkan prinsip *Good University Governance* yang seharusnya ada dalam sistem penjaminan mutu belum terlihat. Sembilan belas tahun eksistensi UPPS-KIP sebagai lembaga penyelenggara pendidikan tinggi masih berkelindan pada *classical problem* perguruan tinggi, diantaranya: belum tercukupi nisbah dosen terhadap mahasiswa, belum optimalnya rasio dosen tidak tetap terhadap Dosen Tetap Program Studi (DTPS), belum maksimalnya beban kerja dosen dalam pelaksanaan caturdarma, *deployment* dosen pada tugas-tugas administratif yang menghambat Caturdarma dan memengaruhi penjenjangan karir tenaga kependidikan, serta kualifikasi pendidikan dosen bergelar Doktor yang masih sangat sedikit persentasenya, serta Jabatan Fungsional dosen untuk Lektor Kepala dan Guru Besar yang belum ada.

2. Pendidikan

Kekuatan

- a. Memiliki 7 (tujuh) fakultas yang menyelenggarakan 15 (lima belas) program sarjana strata satu (S1), memberikan banyak pilihan bagi masyarakat yang berada di wilayah Kepulauan Buton.
- b. 46% program studi yang diselenggarakan berperingkat akreditasi B oleh BAN-PT.
- c. Lonjakan kuantitas peminat yang terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun menunjukkan tingginya kepercayaan masyarakat untuk melanjutkan pendidikan di UPPS-KIP.
- d. 93% DTPS berpendidikan S2 dan sisanya berpendidikan S3.
- e. Pengaplikasian Sistem Informasi Akademik yang memberikan kemudahan akses informasi kepada dosen, mahasiswa, dan orang tua mahasiswa.
- f. Kurikulum setiap program studi yang telah menyesuaikan dengan tuntutan SN-Dikti dan KKNI.
- g. Koleksi pustaka yang terus mengalami peningkatan untuk memenuhi kebutuhan rujukan literatur bagi dosen dan mahasiswa.

Kelemahan

- a. 54% akreditasi program studi masih berstatus akreditasi C.
- b. Hanya 7% dosen bergelar S3.
- c. Lonjakan jumlah mahasiswa tidak diikuti dengan ketersediaan ruang belajar yang memadai.
- d. Perpustakaan yang belum menerapkan penggunaan teknologi informasi (*e-library*).
- e. Sistem pembelajaran belum berbasis *e-learning*.

3. Lingkungan Akademik

Kekuatan

- a. Basis Kemaritiman, *Entrepreneurship*, dan Al Islam Kemuhammadiyah yang diintegrasikan dalam kegiatan akademik sebagai penciri UPPS-KIP.

- b. Dari 172 DTPS, 16% berjabatan Lektor, dan 34% telah tersertifikasi sebagai dosen profesional.
- c. Peningkatan jumlah publikasi hasil riset pada jurnal nasional terakreditasi dan jurnal internasional bereputasi.
- d. Peningkatan kualitas kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) yang dilaksanakan oleh tim dosen dengan melibatkan mahasiswa.
- e. Terbangunnya kerjasama dalam dan luar negeri yang mendukung pengembangan program studi dan posisi strategis Fakultas.
- f. Penerapan *reward* kepada dosen yang berhasil melakukan Penelitian dan PkM beserta publikasinya.

Kelemahan

- a. Masih terdapat 12% DTPS yang berstatus Tenaga Pengajar, 72% masih berjabatan Asisten Ahli, belum adanya Lektor Kepala dan Guru Besar.
- b. Hasil penelitian dan PkM belum mampu secara optimal diintegrasikan ke dalam bahan ajar/materi perkuliahan.
- c. Belum maksimalnya Fakultas dan Program Studi menindak lanjuti kerjasama yang telah ada.
- d. Hasil penelitian yang terpublikasi internasional mayoritas masih pada jenis prosiding dan jumlah sitasi yang masih sedikit.
- e. Penggunaan dosen tidak tetap belum berdasarkan pada syarat kompetensi keahlian yang tersertifikasi.
- f. Belum diterapkannya wajib publikasi bagi mahasiswa yang sedang tugas akhir.

4. Manajemen Internal

Kekuatan

- a. Mekanisme pengajuan anggaran untuk mendukung penyelenggaraan kegiatan akademik melibatkan setiap program studi.
- b. Penganggaran mulai dari tingkatan Fakultas sampai kepada unit-unit pelaksana teknis telah berbasis *outcome* atau pemenuhan tuntutan instrumen akreditasi BAN-PT baik AIPT maupun APS.
- c. Rekrutmen Dosen Tetap berbasis pemenuhan rasio dosen: mahasiswa melalui panitia seleksi di tingkatan Fakultas;

- d. Rekrutmen Tenaga Kependidikan berbasis pemenuhan kebutuhan tenaga administratif.
- e. *Job Description* yang jelas mulai dari pimpinan tertinggi sampai kepada staf.
- f. Pengelolaan website sebagai salah satu sarana promosi dikelola dengan baik.
- g. Lembaga Penjaminan Mutu diberi kewenangan dalam merumuskan dan monev terhadap pelaksanaan peningkatan mutu dosen dan pembelajaran.
- h. Komitmen yang tinggi untuk menjadikan kampus UPPS-KIP sebagai instrumen dakwah Islam dan Kemuhammadiyah sebagai salah satu penciri institusi.

Kelemahan

- a. Penetapan besaran anggaran tiap program studi masih mengacu pada jumlah mahasiswa bukan pada kebutuhan riil program studi.
- b. Belum terencananya dengan baik pengembangan sumber daya manusia untuk pembukaan program studi baru.
- c. Kebijakan penjenjangan karir tenaga kependidikan yang belum tersusun.
- d. Sistem *reward and punishment* yang belum optimal dilaksanakan.
- e. Masih rendahnya budaya kerja organisasi yang berorientasi kualitas.
- f. Pranata Humas belum mampu bekerja secara profesional dalam pengelolaan kehumasan institusi.
- g. Lembaga Penjaminan mutu belum maksimal meningkatkan mutu dosen dan pengembangan model pembelajaran yang berdampak pada mutu lulusan, efektivitas dan efisiensi anggaran.

5. *Income Generating*

Kekuatan

- a. Semangat menumbuhkan jiwa *Entrepreneurship* kepada Sivitas Akademika menjadi modal utama dalam penciptaan wirausahawan-wirausahawan baru dan unit-unit usaha baru di internal institusi.

- b. Telah terbangunnya beberapa unit usaha sebagai sumber pendapatan baru bagi institusi selain dana dari mahasiswa.
- c. Besarnya jumlah mahasiswa sebagai pangsa pasar yang bisa memanfaatkan keberadaan unit usaha.
- d. Dukungan yang tinggi dari pimpinan untuk membentuk unit-unit usaha baru sebagai *new income generating*.
- e. Klaster Madya bidang Penelitian dan PkM berpotensi menyumbangkan pendapatan institusi sebesar Rp. 2 Miliar.
- f. Klaster 4 untuk Institusi berpotensi membantu UPPS-KIP dalam pembangunan sarana dan prasana sebanyak Rp. 1 Miliar.

Kelemahan

- a. Persentase total pendapatan Fakultas masih lebih besar bersumber dari pendapatan mahasiswa.
- b. Jumlah unit usaha yang masih sedikit sehingga belum mampu memberikan kontribusi yang besar bagi pendapatan institusi.
- c. Belum adanya cetak biru pembangunan unit usaha baru.
- d. Peningkatan Klaster Penelitian dan PkM tidak disertai peningkatan kualitas proposal penelitian dan PkM dosen sehingga banyak proposal tidak layak pendanaan.

6. Sarana dan Prasarana

Kekuatan

- a. UPPS-KIP telah berinvestasi pada pengadaan lokasi kampus sehingga proyeksi pengembangan lokasi kampus dapat terpenuhi.
- b. UPPS-KIP memiliki 3 (tiga) buah gedung perkuliahan yang letaknya sangat strategis, dan 2 (dua) lokasi rencana pembangunan kampus baru.
- c. Adanya dukungan yang kuat dari pimpinan Fakultas dalam pengaplikasian dan komitmen yang tinggi untuk berinvestasi di bidang *Information and Communication Technology*.
- d. Tersedianya sekretariat bagi seluruh organisasi kemahasiswaan internal, dan Unit Kegiatan Mahasiswa.

- e. Tersedianya 12 (dua belas) laboratorium program studi pendukung kegiatan pembelajaran mahasiswa.

Kelemahan

- a. Jumlah mahasiswa yang terus mengalami peningkatan tidak disertai dengan ketersediaan ruang belajar.
- b. Belum representatifnya ketersediaan ruang kerja dosen.
- c. Lahan parkir tidak mampu menampung seluruh kendaraan dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa.
- d. Belum tersedianya cetak biru penerapan sistem informasi berbasis ICT.
- e. Spesifikasi dan jumlah peralatan laboratorium program studi belum memenuhi rasio standar ketercukupan.
- f. Masih terdapat program studi yang belum memiliki laboratorium.

B. Situasi Eksternal

1. Peluang (*Opportunities*)

- a. Tersedianya kesempatan bagi dosen untuk memanfaatkan keberadaan fasilitas beasiswa studi lanjut dalam negeri dan luar negeri dari Kemenristekdikti dan Majelis Dikti Litbang PP Muhammadiyah;
- b. Program kerjasama internasional yang terus digalakkan oleh Majelis Dikti Litbang PP Muhammadiyah dengan mengikut sertakan seluruh PTM;
- c. Besarnya peluang keterlibatan SDM UPPS-KIP dalam pelaksanaan dan pengembangan program kerja sama dengan pemerintah daerah;
- d. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi semakin memudahkan UPPS-KIP dalam meningkatkan promosi dan pemanfaatan pengembangan metode pembelajaran;
- e. Perubahan dalam kebijakan di bidang pendidikan khususnya perguruan tinggi yang membuka kesempatan untuk bersaing dengan perguruan tinggi lainnya.

2. Ancaman (*Threatnes*)

- a. Regulasi pemerintah yang terus mengalami peningkatan tuntutan;
- b. Tuntutan terhadap perguruan tinggi untuk melakukan hilirisasi hasil-hasil riset dan pengabdian kepada masyarakat yang dapat digunakan di dunia industri;
- c. Maraknya *start up* pendidikan sebagai bentuk teknologi pembelajaran;
- d. Stigma sebagai kampus demonstrasi;
- e. Kebijakan pemerintah daerah yang tidak memperbolehkan pembangunan gedung lebih dari 4 tingkat, sedangkan lokasi yang dimiliki terbatas;
- f. Persaingan lulusan yang semakin ketat.

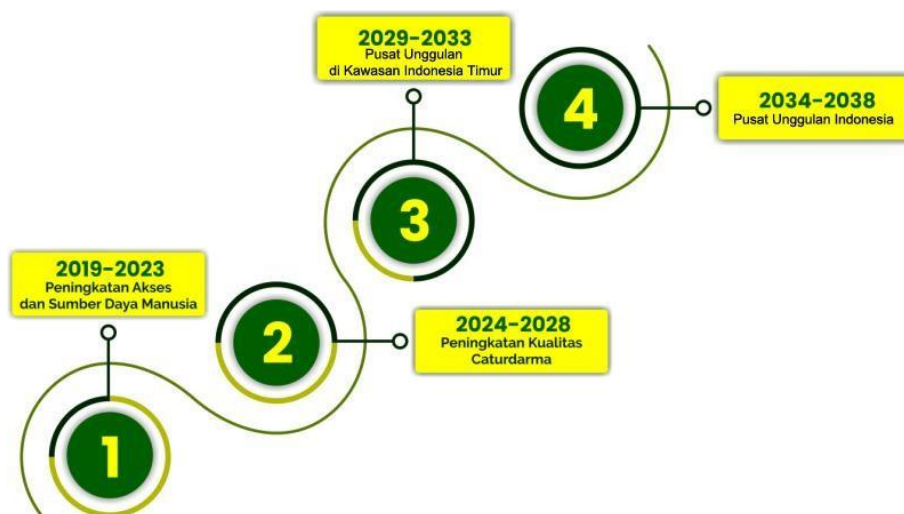
BAB IV

ARAH PENGEMBANGAN (ROAD MAP)

A. Skenario Perencanaan

Peta jalan untuk Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (UPPS-KIP) 2019-2038 dikembangkan dengan memeriksa situasi internal dan situasi eksternal (kekuatan dan kelemahan). Dengan memperhatikan kondisi-kondisi ini, UPPS-KIP berkomitmen untuk meningkatkan aksesibilitas dan sumber daya dalam menciptakan organisasi yang sehat, terdiversifikasi secara strategis dan kompatibel.

Sejalan dengan ini, arah pengembangan UPPS-KIP juga mengatasi tantangan makro yang juga mempengaruhi sektor pendidikan seperti kondisi ekonomi, pengembangan kebijakan, liberalisasi pendidikan, pengembangan teknologi dan tuntutan keterampilan sumber daya manusia global. Oleh karena itu, arah pengembangan UPPS-KIP dalam 20 tahun ke depan diatur dalam rencana yang dibagi menjadi empat tahap yang saling berkelanjutan.



Gambar 1. Arah Pengembangan UPPS-KIP Tahun 2019-2038

1. Tahapan Pertama (2019-2023) mengusung tema **"Komitmen dan Penguatan"**.

UPPS-KIP membangun komitmen bersama untuk peningkatan tata kelola institusi yang sehat, efisien dan efektif. Dan memperkuat kekuatan internal untuk mengoptimalkan fasilitas dan infrastruktur pembelajaran dan pengembangan sumber daya manusia.

2. Tahapan Kedua (2024-2028), UPPS-KIP Mulai membangun kekuatan internal untuk melakukan **"Diversifikasi Strategi"** Fase ini mempromosikan pengembangan tata kelola kelembagaan yang baik dan manajemen berbasis IT, yang mempromosikan kualitas caturdarma dan meningkatkan kapasitas *networking*.
3. Tahapan Ketiga (2029-2033), dalam mencapai UPPS-KIP unggul di regional melalui perluasan **"Tata Kelola Kelembagaan"**. Tahap ini berfokus pada menjadikan UPPS-KIP sebagai fakultas yang unggul secara regional di bidang pendidikan, penelitian terkemuka dan layanan masyarakat. Kualitas sistem informasi berbasis IT dan jaringan yang baik mendukung hal ini.
4. Tahapan Keempat tahun (2034-2038), UPPS-KIP Memperoleh pengakuan global melalui **"Transformasi Tata Kelola "** yang optimal, sumber daya manusia yang kompeten, kualitas caturdarma berkualitas tinggi, dan kualitas jaringan berstandar nasional dan internasional.

Tabel 2. Sasaran dan Target Capaian UPPS-KIP Tahun 2019-2038

Komponen/ Tahapan Roadmap	Tahap I (2019-2023)	Tahap II (2024-2028)	Tahap III (2029-2033)	Tahap IV (2034-2038)
	Tahap Peningkatan Akses dan sumberdaya manusia	Tahap Peningkatan kualitas caturdarma	Tahap Pusat Unggulan Pendidikan di kawasan Indonesia Timur	Tahap Pusat Unggulan Nasional
Strategi	Komitmen terhadap tata kelola organisasi yang sehat, efektif dan efisien. Optimalisasi fasilitas pembelajaran, infrastruktur, dan pengembangan sumber daya manusia.	Diversifikasi strategi tata kelola Institusi dan manajemen berbasis IT yang mendukung pencapaian kualitas caturdarma, serta penguatan kapasitas <i>networking</i> .	Ekspansi tata kelola organisasi yang optimal, sumberdaya manusia kompeten, dan kualitas caturdarma unggul, serta kualitas <i>networking</i> .	Transformasi tata kelola organisasi yang optimal, sumberdaya manusia kompeten, dan kualitas caturdarma unggul, serta kualitas <i>networking</i> yang terstandarisasi Nasional.
Definisi	Fakultas yang memiliki pijakan pada kekuatan internal organisasi, berfokus pada penyediaan sarana dan prasarana yang representatif dan didukung oleh kualifikasi sumberdaya manusia yang kompeten.	Fakultas yang memiliki reputasi dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat, serta ditunjang dengan kualitas manajemen berbasis IT dan <i>networking</i> yang kuat.	Fakultas yang Unggul lingkup regional dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat, serta ditunjang dengan kualitas <i>networking</i> yang kuat.	Fakultas yang Unggul lingkup Nasional dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat, serta ditunjang dengan kualitas <i>networking</i> yang kuat.
Target	• Terwujudnya pendidikan dan pengajaran yang berkualitas; • Terwujudnya karakter	• Meningkatnya keunggulan kualitas akademik; • Meningkatnya kesadaran entrepreneurship;	• Meningkatnya keunggulan kualitas akademik tingkat regional; • Penguatan jiwa	• Meningkatnya keunggulan kualitas akademik berstandar Nasional; • Terwujudnya

Komponen/ Tahapan Roadmap	Tahap I (2019-2023)	Tahap II (2024-2028)	Tahap III (2029-2033)	Tahap IV (2034-2038)
	Tahap Peningkatan Akses dan sumberdaya manusia	Tahap Peningkatan kualitas caturdarma	Tahap Pusat Unggulan Pendidikan di kawasan Indonesia Timur	Tahap Pusat Unggulan Indonesia
	entrepreneurship dan Islami; • Menghasilkan penelitian dan publikasi bereputasi; • Menghasilkan produk pengabdian masyarakat berbasis riset dan inovasi; • Terwujudnya tata kelola institusi yang profesional; • Implementasi nilai-nilai AIK.	• Meningkatkan publikasi penelitian bereputasi. • Meningkatnya produk pengabdian masyarakat berbasis riset dan inovasi. • Meningkatnya tata kelola organisasi yang baik dan manajemen berbasis IT yang handal; • Meningkatnya Implementasi nilai-nilai AIK.	<i>entrepreneurship</i>; • Meningkatnya publikasi penelitian bereputasi dan produk pengabdian masyarakat berdampak; • Terciptanya tata kelola organisasi yang baik dan handal berstandar nasional; • Terwujudnya pengembangan dakwah AIK.	pengembangan jiwa entrepreneurship dengan inovasi produk baru dan diversifikasi pendapatan; • Meningkatnya keunggulan bidang penelitian dan pengabdian masyarakat bereputasi; • Terciptanya sistem tata kelola institusi berbasis IT dan berstandar Nasional; • Terwujudnya masyarakat Islam sebenar-benarnya bagi warga kampus.

B. Arah Pengembangan

1. Pengembangan Tahap Pertama (2019-2023), Peningkatan Akses dan Sumberdaya Manusia.

UPPS-KIP diharapkan dapat meningkatkan aksesibilitas pendidikan tinggi berdasarkan pengetahuan maritim, enterpreneurship dan kearifan lokal di akhir tahap ini. UPPS-KIP juga menyediakan infrastruktur , tata kelola kelembagaan profesional dan berbasis IT. Untuk tujuan ini, UPPS-KIP berfokus pada organisasi organisasi sumber daya manusia (SDM) yang kompeten untuk mencapai organisasi yang sehat, efektif dan efektif yang didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten. Ketersediaan komponen pembelajaran yang berbeda, mulai dari perangkat lunak (program, keterampilan dan budaya akademik) hingga perangkat keras (fasilitas dan infrastruktur fisik), mencerminkan kondisi ini.

2. Pengembangan Tahap Kedua (2024-2028), Peningkatan Kualitas Caturdarma.

Setelah reformasi struktur layanan dan sistem manajemen oleh UPPS-KIP, fasilitas dan infrastruktur yang representatif didukung. Kemudian ditingkatkan menjadi UPPS yang efektif dan fokus untuk keunggulan dalam organisasi caturdarma, kesadaran enterpreneurship, peningkatan publikasi penelitian terkemuka, peningkatan penelitian dan produk layanan masyarakat yang didorong inovasi, peningkatan tata kelola organisasi dan manajemen TI yang andal, dan peningkatan implementasi AIK. UPPS-KIP diharapkan untuk menghasilkan lulusan pada tahap ini dengan pengetahuan yang baik tentang bidang-bidang keunikan lokal ilmiah dan / atau kemaritiman tertentu dan mendukung karakter Islam dengan keterampilan intelektual yang berkualitas serta berjiwa *enterpreuner*.

3. Pengembangan Tahap Ketiga (2029-2033), UPPS-KIP menjadi Pusat Unggulan di Kawasan Indonesia Timur.

Tahap ini merupakan tahap perluasan UPPS-KIP, yang secara bersamaan memprakarsai arah baru untuk mengembangkan UPPS-KIP menuju fakultas unggul regional. Arah baru ini (dipulihkan) dianggap sebagai sarana bagi UPPS-KIP untuk memberikan nilai tambah bagi masyarakat berstandar nasional dalam pemberian pendidikan, penelitian, dan layanan masyarakat. Oleh karena itu UPPS-KIP telah meningkatkan dan mengembangkan segala sesuatu di tingkat standar nasional fakultas seperti kurikulum, SDM, TI, penelitian, komunitas dan jaringan. Pada titik ini, kebijakan tersebut dimaksudkan untuk mempersiapkan diri untuk produksi dan manajemen produk non-pendidikan baru yang dihasilkan dengan memperkuat semangat *entrepreneurship*. Diharapkan bahwa diversifikasi pendapatan juga akan terjadi pada tahap ini, sehingga UPPS-KIP terutama akan berasal dari penerimaan dana non-mahasiswa ketika mengelola anggarannya.

4. Pengembangan Tahap Keempat (2034-2038), UPPS-KIP sebagai Pusat Unggulan Indonesia.

Tahap terakhir dalam pengembangan UPPS-KIP adalah transformasi institusi yang berfokus pada penguatan diri sebagai fakultas terkemuka di Indonesia. Pada tahap ini, reputasi UPPS-KIP dipandang sebagai kepemimpinan profesional institusional, sangat baik dalam organisasi catur dan semangat *entrepreneurship* yang didukung oleh jaringan yang berkualitas. UPPS-KIP diharapkan memiliki standar nasional dan internasional kualitas akademik, kewirausahaan, inovasi produk baru dan diversifikasi pendapatan, peningkatan keunggulan iklan dan layanan kepada komunitas terkemuka, tata kelola berbasis IT dan AIK.

BAB V

STRATEGI DASAR, KEBIJAKAN DASAR, DAN INDIKATOR KINERJA

A. Bidang Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama

Sebagai bagian dari perguruan tinggi Muhammadiyah, UPPS-KIP secara struktur organisasi di bawah Majelis Dikti Litbang PP Muhammadiyah. Oleh karena itu, pengelolaan organisasi UPPS-KIP mengacu pada fungsi manajemen (*Planning, organizing, budgeting, actuating, controlling*) yang merujuk pada kebijakan PP Muhammadiyah. Sistem tata kelola UPPS-KIP yang baik dan handal, akan memengaruhi pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran. Penyusunan RIP ini diarahkan pada revitalisasi organisasi serta membangun komitmen Sumberdaya manusia. Selain itu juga pembenahan dilakukan terhadap proses pembangunan sumberdaya manusia yang terukur dan terstandarisasi meliputi; rekrutmen, pembinaan, monitoring, evaluasi dan purna tugas. UPPS-KIP juga mulai membangun jejaring kerjasama yang berkualitas melalui asas setara dan saling menguntungkan.

1. Bidang Tata Pamong

a. Tahapan I, Peningkatan Akses dan Sumberdaya Manusia (2019-2023).

Pada tahap ini UPPS-KIP membangun tata pamong yang berbasis kompetensi dengan harapan proses layanan administratif yang efektif dan efisien. Untuk itu, UPPS-KIP membuat kebijakan yang turut mendukung budaya kerja yang baik, penempatan sumberdaya berdasar kompetensi, jenjang karir yang jelas dan terukur, serta mulai menerapkan manajemen layanan berbasis teknologi informasi.

1) Strategi Dasar

Tata Pamong berbasis kompetensi untuk organisasi yang sehat dan berkelanjutan.

2) Kebijakan Dasar

- a) Peraturan yang mendukung tercapainya *Good University Governance* (GUG) dalam sistem tata pamong tiap unit kerja;
- b) Kesesuaian wewenang dan tanggungjawab SDM dalam tiap

tingkatan unit kerja;

- c) Standarisasi peraturan tentang analisa jabatan, etika dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa;
- d) Implementasi kebijakan tentang pemilihan pimpinan tiap unit kerja yang akuntabel;
- e) Rekrutmen dan pelatihan peningkatan *skill* SDM;
- f) Penguatan terhadap pemahaman visi, misi dan tujuan organisasi;
- g) Monitoring & evaluasi kinerja SDM melalui pemanfaatan IT.

3) Indikator Kinerja

- a) Terdapat dokumen kebijakan dan implementasi *Good University Governance* (GUG) di UPPS-KIP;
- b) Dokumen Kebijakan tentang pembagian tugas pokok dan fungsi sesuai wewenang dan tanggungjawab yang jelas dan terstandarisasi;
- c) Adanya standar tata pamong yang akuntabel;
- d) Adanya sistem rekrutmen dan pelatihan peningkatan *skill* SDM yang berkelanjutan dan terukur;
- e) Memiliki kepemimpinan yang efektif pada tiap unit kerja;
- f) Pemahaman visi, misi dan tujuan organisasi oleh sivitas akademika;
- g) Terlaksananya monitoring dan evaluasi kinerja organisasi dan komitmen SDM melalui sistem informasi kepegawaian yang berkelanjutan dan terukur.

b. Tahapan II, Peningkatan kualitas caturdarma (2024-2028).

Pada tahap ini sistem tata pamong di UPPS-KIP telah berjalan dengan baik, transparan dan akuntabel. Sehingga tahap ini, UPPS-KIP mengarahkan kekuatan internal tersebut dalam rangka mencapai keunggulan dalam pelaksanaan caturdarma perguruan tinggi. Untuk itu, tata pamong diarahkan untuk mendukung penguatan budaya kerja yang profesional melalui kepemimpinan yang transformatif.

1) Strategi Dasar

Membangun kompetensi organisasi untuk keunggulan caturdarma perguruan tinggi.

2) Kebijakan Dasar

- a) Penguatan penyelenggaraan manajemen *Good University Governance* (GUG) yang terstandarisasi;
- b) Mengembangkan gaya dan budaya kerja yang menciptakan keunggulan kompetitif;
- c) Merumuskan kebijakan *reward and punishments*;
- d) Menemukan potensi keunikan lokal.

3) Indikator Kinerja

- a) Memiliki manajemen pelayanan yang sesuai dengan prinsip *Good University Governance* (GUG) di tiap Unit Kerja UPPS-KIP;
- b) Terdapat dokumen Kebijakan Budaya Kerja yang profesional dan berorientasi kearifan lokal yang jelas, terukur, handal dan kompetitif;
- c) Adanya hasil evaluasi kepuasan dan Integritas Kerja yang profesional;
- d) Menemukan keunikan dan keunggulan organisasi berbasis kearifan lokal;
- e) Adanya peningkatan mutu layanan pada tiap unit kerja.

c. Tahapan III, Pusat Unggulan Indonesia (2029-2033).

Pada tahap ini adalah masa ekspansi UPPS-KIP menuju keunggulan nasional. Untuk itu, langkah ini diyakini sebagai sarana untuk mengantarkan UPPS-KIP sebagai institusi yang terstandarisasi nasional. Pada tahap ini dibutuhkan tipe kepemimpinan yang berpandangan jauh ke depan dan memiliki motivasi untuk melakukan hal-hal baru (*visio transformational leadership*) dalam menjawab tantangan tersebut.

1) Strategi Dasar

Manajemen Penyelenggaraan Perguruan Tinggi yang terstandarisasi Nasional

2) Kebijakan Dasar

- a) Memperkuat budaya organisasi;
- b) Pelatihan peningkatan *skill* SDM;
- c) Pelayanan yang terstandarisasi dan tersertifikasi nasional;
- d) Kesesuaian wewenang dan tanggungjawab dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi pada tiap unit kerja.

3) Indikator Kinerja

- a) Memiliki pemimpin yang efektif dan transformatif pada tiap unit kerja;
- b) Kualitas kinerja yang profesional;
- c) Kinerja unit kerja yang memiliki standarisasi dan sertifikasi nasional;
- d) Manajemen kinerja yang akuntabel dan Transparan.

d. Tahapan IV, Pusat Unggulan Dunia (2034-2038).

UPPS-KIP pada tahap ini melakukan rangkaian transformasi institusi, yang difokuskan pada ranah pemantapan diri sebagai Fakultas unggulan dunia. Untuk itu, UPPS-KIP menyadari perlunya penguatan visi kepemimpinan serta pengelolaan institusi secara profesional. Pada tahap ini sivitas akademika mampu menciptakan dan mengembangkan produk penelitian unggulan bermanfaat langsung bagi Fakultas, masyarakat, industri dan pengembangan ilmu pengetahuan.

1) Strategi Dasar

Manajemen Penyelenggaraan Perguruan Tinggi yang terstandarisasi Internasional

2) Kebijakan Dasar

- a) Penguatan kepemimpinan organisasi tiap unit kerja;
- b) Mengembangkan budaya organisasi yang profesional dan kompetitif;

- c) Pelayanan yang terstandarisasi dan tersertifikasi internasional;
- d) Penjaminan mutu terhadap kompetensi pegawai yang mendukung kerjasama internasional.

3) Indikator Kinerja

- a) Adanya pengakuan publik terhadap pimpinan sebagai *publik figure*;
- b) Penguatan budaya kerja dan integritas;
- c) Adanya pelayanan pada unit kerja yang memperoleh sertifikasi internasional;
- d) Adanya aturan pengembangan kompetensi pegawai yang berstandar internasional.

2. Bidang Tata Kelola Organisasi

a. Tahapan I, Peningkatan Akses dan Sumberdaya Manusia (2019-2023).

Pada tahap ini UPPS-KIP membangun sistem tata kelola yang menjamin adanya aksesibilitas publik yang baik. Untuk itu, UPPS-KIP membuat kebijakan tata kelola organisasi yang profesional, pemanfaatan IT dalam manajemen layanan, dan pengaturan struktur organisasi yang adaptif terhadap kebutuhan mutakhir penyelenggaraan perguruan tinggi.

1) Strategi Dasar

Tata kelola organisasi yang sehat dan berkelanjutan.

2) Kebijakan Dasar

- a) Perintisan prinsip *Good University Governance* (GUG) dalam organisasi;
- b) Struktur organisasi yang didukung dengan wewenang dan tanggungjawab yang jelas dalam tiap tingkatan unit kerja,;
- c) Penguatan visi, misi dan tujuan organisasi;
- d) Mewujudkan manajemen pelayanan yang profesional dan berbasis teknologi;
- e) Penjaminan Mutu organisasi.

3) Indikator Kinerja

- a) Dokumen kebijakan dan implementasi prinsip *Good University Governance* (GUG) di UPPS-KIP;
- b) Dokumen Kebijakan terstandar tentang struktur organisasi unit kerja di UPPS-KIP dengan wewenang dan tanggungjawab yang jelas dan berkelanjutan;
- c) Kinerja organisasi yang efektif, efisien dan akuntabel;
- d) Penggunaan sistem informasi dalam manajemen pelayanan baik akademik maupun non akademik;
- e) Tersedianya Dokumen penjaminan mutu dan pelaksanaan caturdarma.

b. Tahapan II, Peningkatan kualitas caturdarma (2024-2028).

Pada tahap ini organisasi UPPS-KIP telah memiliki kebijakan tata kelola organisasi yang lengkap. Sehingga tahap selanjutnya UPPS-KIP secara organisasional dijalankan untuk memberikan dukungan pada penyelenggaraan caturdarma perguruan tinggi yang berkualitas. Untuk itu, organisasi dikembangkan dengan prinsip profesionalisme kerja ditunjang pula oleh manajemen organisasi berbasis teknologi informasi (IT).

1) Strategi Dasar

Memperkuat organisasi untuk keunggulan caturdarma perguruan tinggi.

2) Kebijakan Dasar

- a) Implementasi prinsip *Good University Governance* (GUG) yang terstandarisasi dalam tata kelola organisasi pada tiap unit kerja;
- b) Mengembangkan gaya dan budaya kerja yang termanifestasi dalam tata kelola organisasi yang efektif dan efisien;
- c) Penyusunan kebijakan pengembangan unit usaha;
- d) Penguatan instrumen pengembangan organisasi pada tiap unit kerja;

- e) Pelayanan akademik dan non akademik yang memanfaatkan teknologi informasi;
- f) Penjaminan mutu tiap unit kerja.

3) Indikator Kinerja

- a) Adanya peningkatan kinerja unit kerja yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel;
- b) Terdapat kepemimpinan yang efektif dan efisien pada tiap unit kerja;
- c) Adanya dokumen perencanaan pengembangan unit usaha;
- d) Adanya Dokumen perencanaan pengembangan organisasi tingkat unit kerja;
- e) Pelayanan berbasis teknologi informasi;
- f) Peningkatan peringkat akreditasi institusi dan program studi.

c. Tahapan III, UPPS-KIP menjadi Pusat Unggulan Indonesia (2029-2033).

Tata kelola organisasi UPPS-KIP pada tahap ini telah menjalankan prinsip *Good University Governance* (GUG). Tahap selanjutnya, organisasi diarahkan untuk memiliki keunggulan kompetitif tingkat nasional. UPPS-KIP menyadari bahwa organisasi yang optimal membutuhkan kepemimpinan yang berpandangan jauh ke depan dan memiliki motivasi untuk melakukan hal-hal baru (*vision transformational leadership*) dalam menjawab tantangan tersebut. Untuk itu, pada tahap ini UPPS-KIP memfokuskan pengembangannya pada penguatan kelembagaan yang dicirikan pada kepemimpinan yang efektif, program kerja yang terukur, pelayanan berbasis IT dan kinerja yang terstandarisasi dan tersertifikasi nasional.

1) Strategi Dasar

Organisasi UPPS-KIP yang terstandarisasi Nasional

2) Kebijakan Dasar

- a) Penguatan tata kelembagaan pada tiap unit kerja;

- b) Unit pelayanan yang berbasis pada pemanfaatan teknologi informasi;
- c) Unit pelayanan yang terstandarisasi & tersertifikasi nasional;
- d) Pengembangan unit bisnis;
- e) Penjaminan mutu yang berorientasi pada pencapaian standarisasi nasional.

3) Indikator Kinerja

- a) Adanya mekanisme rotasi kepemimpinan yang transparan, program unit kerja yang terarah, serta pelaksanaan peraturan kepegawaian yang konsekuen dan berkelanjutan;
- b) Pelayanan berbasis online yang ditunjang dengan kepemilikan server layanan mandiri;
- c) Peningkatan jumlah unit bisnis;
- d) Terdapat unit kerja yang memperoleh sertifikasi nasional;
- e) Adanya kebijakan dan implementasi jaminan mutu yang berstandar nasional.

d. Tahapan IV, UPPS-KIP sebagai Pusat Unggulan Dunia (2034- 2038).

Pada tahap rangkaian transformasi institusi yang dilakukan oleh UPPS-KIP, diorientasikan terhadap penguatan keunggulan institusi menuju pengakuan dunia. Dengan begitu, UPPS-KIP melakukan penguatan kelembagaan melalui visi kepemimpinan tiap unit kerja, profesionalisme pengelolaan lembaga, penyediaan sarana dan prasarana internasionalisasi tiap unit kerja, serta penjaminan mutu catur darma yang mutakhir.

1) Strategi Dasar

Organisasi UPPS-KIP yang terstandarisasi Internasional

2) Kebijakan Dasar

- a) Penguatan kelembagaan unit kerja yang berstandar internasional;
- b) Pelayanan yang terstandarisasi dan tersertifikasi internasional;

- c) Kemandirian tata kelola organisasi tiap unit kerja;
- d) Meningkatnya citra UPPS-KIP di masyarakat;

3) Indikator Kinerja

- a) Adanya unit kerja yang memperoleh sertifikasi internasional;
- b) Adanya pelayanan terstandar internasional yang efektif dan terintegrasi pada setiap unit kerja;
- c) Adanya unit kerja layanan khusus untuk negara atau institusi mitra kerjasama internasional;
- d) Meningkatkan kepercayaan masyarakat;
- e) Meningkatnya jumlah lulusan yang diperhitungkan oleh pemerintah dan lembaga lainnya baik dalam dan luar negeri.

3. Bidang Kerjasama

a. Tahapan I, Peningkatan Akses dan Sumberdaya Manusia UPPS-KIP (2019-2023).

Pada tahap ini UPPS-KIP fokus pada peningkatan kerjasama baik dengan dalam maupun luar negeri yang berorientasi pelaksanaan catur darma. Selain itu, optimalisasi kerjasama yang telah dilakukan sebelumnya dalam rencana tindak lanjut yang berkualitas dan terarah.

1) Strategi Dasar

Peningkatan kerjasama dengan institusi dalam dan luar negeri.

2) Kebijakan Dasar

- a) Peningkatan kerjasama untuk mendukung pelaksanaan catur darma;
- b) Pengembangan kerjasama untuk mendukung aksesibilitas penyelenggaraan caturdarma perguruan tinggi;
- c) Meningkatkan kerjasama untuk pengembangan sumberdaya.

3) Indikator Kinerja

- a) Bertambahnya jumlah institusi dalam dan luar negeri yang melakukan kerjasama dengan UPPS-KIP;

- b) Meningkatkan kegiatan caturdarma (khususnya penelitian dan pengabdian kepada masyarakat) dengan memanfaatkan kerjasama yang dilakukan;
- c) Kemudahan akses kerjasama dengan institusi dalam dan luar negeri;
- d) Adanya *visiting lecture* dan *student mobility* yang terjadwal;
- e) Dokumen MoU, MoA, dan SPK dari institusi kerjasama yang lengkap.

b. Tahapan II, UPPS-KIP unggul dalam Caturdarma perguruan tinggi (2024-2028).

Setelah adanya kebijakan kerjasama dan perluasan ruang lingkup kerjasama yang dilakukan UPPS-KIP. Sehingga pada tahap ini, perluasan kerjasama UPPS-KIP dilakukan dalam bentuk kegiatan penyelenggaraan caturdarma untuk peningkatan mutu Fakultas.

1) Strategi Dasar

Perluasan kerjasama UPPS-KIP baik dalam dan luar negeri.

2) Kebijakan Dasar

- a) Perluasan kerjasama dan kemitraan untuk pelaksanaan caturdarma;
- b) Meningkatkan kualitas kerjasama pada bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- c) Meningkatkan aksesibilitas kerjasama dan kemitraan untuk mendukung pengembangan tata kelola perguruan tinggi.

3) Indikator Kinerja

- a) Bertambahnya jumlah institusi baik lembaga pendidikan maupun pemerintah yang dapat bekerjasama dan bermitra;
- b) Adanya kebijakan *collaboration research* yang efektif;
- c) Adanya dana hibah penyelenggaraan perguruan tinggi yang diperoleh;
- d) Adanya program *visiting lecturer* atau yang sejenisnya untuk pengembangan diri;
- e) Adanya kebijakan *student mobility inbound* dan *outbound* yang terjadwal.

c. Tahapan III, UPPS-KIP menjadi Pusat Unggulan Indonesia (2029-2033).

Setelah kerjasama UPPS-KIP secara kuantitas bertambah dan kualitas kerjasama yang ditunjukkan melalui penyelenggaraan caturdarma yang unggul. Pada tahap selanjutnya, UPPS-KIP mengarah untuk menjadi pusat unggulan indonesia. Dimana pada posisi ini, kerjasama diarahkan untuk membangun reputasi UPPS-KIP dan kemitraan yang berkelanjutan.

1) Strategi Dasar

Penguatan kerjasama sebagai Fakultas unggulan nasional.

2) Kebijakan Dasar

- a) Peningkatan *student mobility* baik dalam dan luar negeri;
- b) Peningkatan *visiting lecturer* bagi dosen;
- c) Peningkatan jumlah *collaboration research* baik dalam dan luar negeri;
- d) Meningkatnya aksesibilitas kerjasama melalui dana hibah kerjasama untuk pengembangan perguruan tinggi.

3) Indikator Kinerja

- a) Adanya *student mobility inbound* dan *outbound* yang terjadwal;
- b) Adanya program *visiting lecturer* dengan institusi tempat kerjasama dan kemitraan yang terjadwal;
- c) Peningkatan persentase publikasi hasil *collaboration research*;
- d) Implementasi kerjasama dalam bentuk dukungan sarana dan prasarana caturdarma (utamanya penelitian) untuk meningkatkan kinerja.

d. Tahapan IV, UPPS-KIP sebagai Pusat Unggulan Dunia (2034- 2038).

Pada tahap transformasi institusi yang dilakukan oleh UPPS-KIP juga diikuti dengan transformasi kerjasama dan kemitraan yang dilakukan. Pada tahap ini, kerjasama dan kemitraan tidak saja terlihat dari kuantitas saja, namun juga kualitas kerjasama dan kemitraan yang mendukung reputasi UPPS-KIP untuk diakui secara global.

1) Strategi Dasar

Penguatan kerjasama dan kemitraan dengan luar negeri.

2) Kebijakan Dasar

- a) Peningkatan sumber daya manusia dalam studi lanjut luar negeri;
- b) *Student Mobility* (pertukaran mahasiswa, KKA dan PKL/ Magang Internasional) dalam meningkatkan kemandirian mahasiswa;
- c) Meningkatkan aksesibilitas tindak lanjut kerjasama dalam kerangka caturdarma perguruan tinggi.

3) Indikator Kinerja

- a) Meningkatnya persentase dosen yang melakukan studi lanjut ke luar negeri sesuai negara tempat kerjasama;
- b) Meningkatnya program *student mobility* yang terjadwal dan negara tujuan yang beragam;
- c) Adanya peningkatan jumlah publikasi internasional;
- d) Adanya dosen yang memperoleh pengakuan global/ rekognisi pada institusi internasional;
- e) Meningkatnya jumlah kegiatan kerjasama yang berdampak, misalnya *visiting lecturer*, *reviewer jurnal* maupun *invited speaker*.

B. Bidang Mahasiswa

a. Tahap I: Peningkatan Akses dan Sumberdaya (Periode 2019 - 2023)

Pada tahap ini Fakultas Muhammadiyah Buton (UPPS-KIP) memiliki komitmen untuk membangun tata kelola organisasi yang sehat, efektif, dan efisien, serta mampu mengoptimalkan sarana dan prasarana pembelajaran, dan menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Sebagai implikasi komitmen tersebut pada bidang kemahasiswaan, UPPS-KIP melakukan penguatan pada sistem penerimaan mahasiswa baru, dan pembangunan layanan kemahasiswaan yang dapat mengembangkan

kompetensi mahasiswa baik secara akademik maupun non akademik.

1) Strategi Dasar

Penguatan sistem penerimaan mahasiswa baru dan layanan kemahasiswaan.

2) Kebijakan Dasar

- a) Pemutakhiran data sistem penerimaan mahasiswa baru dan alumni;
- b) Pemanfaatan sivitas akademika, tenaga kependidikan dan alumni untuk peningkatan promosi dan sebagai sumber pembelajaran;
- c) Peningkatan layanan kemahasiswaan pada aspek penalaran, minat dan bakat, kesejahteraan, bimbingan karir dan entrepreneurship.

3) Indikator Kinerja

- a) Meningkatnya jumlah mahasiswa baru;
- b) Meningkatnya mutu lulusan dengan masa tunggu yang tidak terlalu lama (≤ 6 bulan);
- c) Meningkatnya peran serta alumni dalam kegiatan akademik dan non akademik mahasiswa;
- d) Tersedianya kebijakan, pedoman dan bukti pelaksanaan layanan kemahasiswaan pada aspek: penalaran, minat dan bakat, kesejahteraan, bimbingan karir dan entrepreneurship;
- e) Meningkatnya jumlah kegiatan kemahasiswaan, baik akademik maupun non akademik.

b. Tahap II: Peningkatan Kualitas Caturdarma (Periode 2024 - 2028)

Pada tahap ini UPPS-KIP melakukan *diversifikasi* strategi tata kelola institusi dan manajemen berbasis teknologi informasi yang mendukung pencapaian kualitas caturdarma sehingga diperoleh lulusan yang menguasai dengan baik bidang ilmu tertentu dan/atau keunikan lokal kemaritiman, serta didukung oleh karakter Islami dan jiwa *entrepreneurship*. Pada bidang kemahasiswaan, Fakultas harus mampu meningkatkan sistem tata kelola penerimaan mahasiswa baru, layanan kemahasiswaan, kualitas lulusan, serta peran serta alumni

dalam mewujudkan caturdarma perguruan tinggi.

1) Strategi Dasar

Peningkatan kualitas input mahasiswa, layanan kemahasiswaan, lulusan, dan alumni.

2) Kebijakan dasar

- a) Pemutakhiran data sistem penerimaan mahasiswa baru dan alumni berbasis teknologi informasi (IT);
- b) Peningkatan peran serta sivitas akademika, tenaga kependidikan dan alumni untuk peningkatan promosi dan sumber pembelajaran berbasis teknologi informasi (IT) dan penguatan kapasitas *networking*;
- c) Peningkatan kualitas layanan kemahasiswaan pada aspek penalaran, minat dan bakat, kesejahteraan, serta karir dan bimbingan entrepreneurship;
- d) Peningkatan kegiatan kemahasiswaan yang berbasis kemaritiman dan berjiwa *entrepreneurship*.

3) Indikator Kinerja

- a) Meningkatnya jumlah mahasiswa baru yang berkualitas;
- b) Meningkatnya mutu lulusan dengan masa tunggu yang pendek ($\leq$ 4 bulan);
- c) Meningkatnya peran serta sivitas akademika, tenaga kependidikan dan alumni untuk peningkatan promosi dan sumber pembelajaran;
- d) Ketersediaan kebijakan, pedoman dan bukti pelaksanaan Pengembangan kompetensi mahasiswa, baik akademik maupun non akademik yang berkontribusi pada pembangunan masyarakat kemaritiman;
- e) Meningkatnya kualitas layanan kemahasiswaan yang berkarakter Islami pada aspek berikut ini: penalaran, minat dan bakat, kesejahteraan, bimbingan entrepreneurship, serta bimbingan karir dan informasi kerja bagi lulusan;

- f) Meningkatnya jumlah kegiatan kemahasiswaan baik akademik maupun non akademik yang berkarakter Islami dan berjiwa *entrepreneurship*.

c. Tahap III : Pusat Unggulan Indonesia (Periode 2029 – 2033)

Pada tahapan ini Fakultas Muhammadiyah Buton menjadi Fakultas yang unggul secara nasional dengan melakukan ekspansi tata kelola organisasi, lembaga kemahasiswaan secara optimal, sumber daya manusia yang kompeten, dan kualitas caturdarma yang unggul. Untuk mencapai hal tersebut, perlu disiapkan calon mahasiswa dan mahasiswa yang berkualitas sehingga diperoleh lulusan yang dapat berdaya saing secara nasional. Selain itu, dengan adanya jaringan alumni yang kuat secara nasional, maka diharapkan lulusan UPPS-KIP dapat memperoleh peluang kerja yang lebih cepat dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai Al Islam dan Kemuhammadiyahan.

1) Strategi Dasar

Peningkatan kualitas input mahasiwa, layanan kemahasiswaan, lulusan, dan alumni yang berdaya saing secara nasional.

2) Kebijakan Dasar

- a) Pemutakhiran data sistem mahasiswa baru dan alumni berbasis teknologi informasi (IT) yang mutakhir;
- b) Peningkatan atau penguatan peran serta alumni dalam kegiatan promosi Fakultas pada skala nasional, dan pemberdayaan alumni sebagai tenaga pendidik dan kependidikan;
- c) Peningkatan mutu layanan kemahasiswaan yang berdaya saing nasional dan berkarakter Islami pada aspek berikut: (1) minat dan bakat; (2) peningkatan kesejahteraan; serta (3) penyuluhan karir dan bimbingan enterpreneurship;
- d) Peningkatan dan pengembangan kompetensi mahasiswa, baik di bidang akademik maupun non akademik yang berkontribusi pada pembangunan masyarakat kemaritiman yang berkarakter Islami.

3) Indikator Kinerja

- a) Meningkatnya jumlah mahasiswa baru dan mahasiswa asing yang berkualitas;
- b) Meningkatnya mutu lulusan dengan masa tunggu yang pendek (≤ 3 bulan);
- c) Meningkatnya jumlah alumni yang bekerja pada perusahaan nasional ataupun memperoleh jabatan yang tinggi di pemerintahan ataupun pada pelbagai perusahaan nasional;
- d) Meningkatnya peran serta alumni dalam kegiatan akademik dan non akademik, serta pengadaan fasilitas kampus;
- e) Meningkatnya jumlah kegiatan dan prestasi mahasiswa, baik akademik maupun non akademik yang berkarakter Islami dan berdaya saing pada tingkatan nasional;
- f) Meningkatnya jumlah rekognisi mahasiswa yang bertaraf nasional.

d. Tahap IV: Pusat Unggulan Dunia (Periode 2034-2038)

Pada tahap ini UPPS-KIP melakukan transformasi tata kelola organisasi yang optimal, sumber daya manusia yang kompeten, dan kualitas caturdarma yang unggul, serta kualitas *networking* yang terstandarisasi internasional. Selain itu, UPPS-KIP mengembangkan kompetensi mahasiswa baik secara akademik maupun non akademik yang mampu berdaya saing pada tingkatan internasional. Dengan kompetensi yang dimiliki maka akan tercipta lulusan yang berdaya saing di pasar kerja internasional sehingga jaringan alumni UPPS-KIP akan semakin kuat dan mendunia

1) Strategi Dasar

Peningkatan kualitas input mahasiswa, layanan kemahasiswaan, lulusan, dan alumni yang berdaya saing secara internasional.

2) Kebijakan Dasar

- a) Pemutakhiran data sistem penerimaan mahasiswa baru dan alumni berbasis teknologi informasi (IT) yang mutakhir;

- b) Peningkatan peran serta alumni untuk kegiatan promosi pada skala internasional, pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana kampus, dan sumber pembelajaran;
- c) Peningkatan mutu layanan kemahasiswaan yang berkarakter Islami dan berstandar internasional pada aspek berikut ini: (1) minat dan bakat; (2) peningkatan kesejahteraan; serta (3) penyuluhan karir dan bimbingan entrepreneurship;
- d) Pengembangan kompetensi mahasiswa baik di bidang akademik maupun non akademik yang berkontribusi pada perkembangan ilmu pengetahuan dan kesejahteraan masyarakat yang berbasis kemaritiman dan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai Al Islam dan Kemuhammadiyah.

3) Indikator Kinerja

- a) Meningkatnya jumlah mahasiswa baru dan mahasiswa asing yang memiliki kompetensi akademik dan non akademik yang unggul;
- b) Meningkatnya mutu lulusan dengan masa tunggu yang sangat pendek (≤ 2 bulan);
- c) Meningkatnya jumlah alumni yang bekerja di luar negeri ataupun pada perusahaan-perusahaan yang bertaraf internasional;
- d) Meningkatnya kontribusi alumni dalam pembangunan dan pengembangan kampus dan pengadaan fasilitas-fasilitas yang berbasis teknologi informasi yang mutakhir;
- e) Meningkatnya jumlah kegiatan mahasiswa, baik akademik maupun non akademik yang berbasis kemaritiman, berjiwa *entrepreneurship* dan berkarakter Islami yang berdaya saing pada tingkatan internasional;
- f) Meningkatnya jumlah rekognisi mahasiswa yang bertaraf Internasional.

C. Bidang Sumber Daya Manusia

a. Tahap I: Peningkatan Akses dan Sumber Daya Manusia (2019-2023)

Kebijakan-kebijakan Pimpinan Pusat Muhammadiyah terkait pengelolaan Perguruan Tinggi Muhammadiyah & 'Aisyiyah (PTMA) menjadi acuan bagi UPPS-KIP sebagai salah satu amal usaha milik Persyarikatan Muhammadiyah dalam pengelolaan internal fakultas. Pada tahap ini, Rencana Induk Pengembangan memfokuskan diri pada upaya peningkatan akses dan peningkatan kualitas sumber daya. Upaya meningkatkan akses dan kualitas sumber daya manusia untuk mendukung pencapaian visi, misi, sasaran dan UPPS-KIP ke depan. Peningkatan akses dan sumber daya untuk meningkatkan tata kelola kelembagaan, perluasan akses SDM, TIK dengan kualitas SDM yang bertujuan untuk meningkatkan optimalisasi proses layanan akademik di lingkungan UPPS-KIP. Seluruh proses dilakukan secara terencana dan berkelanjutan atas dasar komitmen yang kuat oleh seluruh komunitas akademik.

1) Strategi Dasar

Peningkatan mutu tata kelola, Optimalisasi Akses Teknologi Informasi, dan Peningkatan Kualitas SDM.

2) Kebijakan Dasar

- a) *Continuing Quality Improvement* dalam penatakelolaan fakultas sebagai wujud penjaminan mutu;
- b) Peningkatan *accessibility* dosen melalui penyediaan sistem informasi terintegrasi dan sistem pembelajaran daring;
- c) Peningkatan jumlah jabatan akademik Lektor Kepala dan jumlah dosen studi lanjut yang relevan dengan keilmuan program studi;
- d) Pengembangan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan melalui program sertifikasi kompetensi;
- e) Program magang, *sharing resources*, dan *visiting lecturer* pada program studi yang terakreditasi unggul;
- f) Monitoring dan evaluasi kegiatan caturdarma dan pengembangan SDM yang terencana dan berkelanjutan.

3) Indikator Kinerja

- a) Implementasi reformasi tata kelola profesional yang memenuhi aspek tata kelola dan manajemen mutu fakultas yang baik;
- b) Meningkatnya kemampuan dosen dalam penggunaan sistem informasi dan sistem pembelajaran berbasis daring;
- c) Tersedianya dosen dengan jabatan akademik Lektor Kepala dan peningkatan jumlah dosen berpendidikan Doktor (S3);
- d) Meningkatnya jumlah dosen dan tenaga kependidikan yang memiliki sertifikat kompetensi berdasarkan bidang tugasnya;
- e) Meningkatnya pengetahuan, keterampilan, pengalaman, dan jumlah rekognisi dosen;
- f) Terlaksananya kegiatan penjaminan mutu melalui proses monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan.

b. Tahap II. Peningkatan Kualitas Caturdarma (2024-2028)

Seluruh penyelenggaraan kegiatan caturdarma (pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan al-Islam Kemuhammadiyah) diupayakan dapat berkontribusi secara maksimal pada kemajuan pembangunan masyarakat, khususnya di Sulawesi Tenggara. Pada aspek pendidikan, seluruh kurikulum haruslah merupakan hasil dari pembacaan untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Sedangkan hasil-hasil dari kegiatan Penelitian dan PkM semaksimal mungkin dapat berguna bagi pengguna dan masyarakat pada umumnya. Selanjutnya aspek AIK menjadi bagian integral dalam menciptakan sumber daya yang beretika untuk mewujudkan karakter sivitas akademika UM Buton yakni berkarakter PROGRESIP (Profesional, Global, dan *Entrepreneurship*).

1) Strategi Dasar

Pengembangan kompetensi SDM yang mendukung peningkatan kualitas caturdarma.

2) Kebijakan Dasar

- a) Reorientasi kurikulum;

- b) *Capacity Building* bidang IPTEKS dan Inovasi dalam kegiatan caturdarma;
- c) Peningkatan standar profesionalisme dosen melalui pengembangan kepakaran dan penerapan al-Islam dan Kemuhammadiyah sebagai etika;
- d) Pengembangan kualitas SDM yang mendukung keberadaan pusat unggulan keilmuan yang berbasis potensi daerah.

3) Indikator Kinerja

- a) Tersusun dan terimplementasinya kurikulum yang memenuhi unsur literasi baru (*software, hardware, brainware*), mendukung pengembangan potensi daerah maritim/keunikan lokal, berjiwa *Entrepreneurship, Internship*, dan menerapkan kegiatan ko-kurikuler dan ekstra kurikuler;
- b) Tersedianya infrastruktur IPTEKS yang mendukung kegiatan *colaboration/cooperation research* (dosen dan mahasiswa, Perguruan Tinggi dan Dunia Industri), peningkatan publikasi dan sitasi, peningkatan HKI dan Paten, serta penerapan hasil Penelitian dan PkM di masyarakat;
- c) Tersedianya dokumen tentang standar profesionalisme dan etika dosen peneliti;
- d) Terbangunnya pusat riset unggulan dan tenaga riset yang dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah dan Industri dalam rangka pengembangan potensi daerah maritim.

c. Tahap III. Pusat Unggulan Pendidikan di Kawasan Indonesia Timur (2029-2033)

UPPS-KIP terus berupaya mewujudkan diri sebagai *Center of Excellent* melalui peningkatan riset pendidikan dan penelitian serta inovasi yang berdaya saing. *Center of Excellent* yang dapat diunggulkan adalah bidang Pendidikan dan penelitian berbasis kemaritiman. Untuk mewujudkan hal tersebut, seluruh dosen dituntut untuk fokus pada pendidikan dan penelitian berbasis kemaritiman dengan hasil yang dapat dimanfaatkan oleh Lembaga pemerintah dan industri, serta berdampak pada lulusan

yang dihasilkan.

1) Strategi Dasar

Peningkatan Kapasitas SDM Penelitian dan Pendidikan berkarakter kemaritiman.

2) Kebijakan Dasar

- a) Program peningkatan jumlah dosen berkualifikasi Doktor dan berjabatan akademik Lektor Kepala;
- b) Pembentukan tim riset dalam satu disiplin ilmu dan/atau lintas disiplin ilmu;
- c) Penguatan Budaya Penelitian dan pendidikan berbasis kemaritiman.

3) Indikator Kinerja

- a) Meningkatnya proporsi SDM bergelar doktor dan berjabatan akademik Lektor Kepala;
- b) Meningkatnya keahlian dosen dalam bidang ilmu dan terciptanya produk hasil penelitian dan pendidikan yang berkontribusi pada pengembangan/penerapan IPTEKS berbasis kemaritiman dan dapat dimanfaatkan oleh pemerintah dan industri, dan terpublikasi serta memperoleh paten atau hak cipta;
- c) Terwujudnya budaya penelitian dan pendidikan berbasis kemaritiman yang integratif, komprehensif, dan kolaboratif, serta berkontribusi pada pembangunan wilayah/masyarakat maritim.

d. Tahap IV. Pusat Unggulan Indonesia (2034-2038)

Melalui komitmen dan konsistensi yang tinggi dari seluruh sivitas akademika UPPS-KIP maka cita-cita untuk mengantarkan UPPS-KIP sebagai salah satu Fakultas rujukan di bidang Pendidikan dan penelitian berbasis kemaritiman dapat terwujud pada tahap akhir pengembangan ini. Beberapa instrumen yang dapat digunakan untuk mengukur kemampuan UPPS-KIP dalam memantaskan dirinya sebagai Fakultas rujukan di bidang pendidikan dan penelitian berbasis kemaritiman adalah proporsi jumlah Guru Besar dan produk inovasi hasil penelitian dan inovasi pendidikan berbasis kemaritiman yang telah digunakan oleh

masyarakat global.

1) Strategi Dasar

Peningkatan Proporsi SDM unggul dan produk IPTEKS yang inovatif dan berdaya saing global.

2) Kebijakan Dasar

- a) Publikasi hasil-hasil penelitian dosen pada jurnal internasional bereputasi Quartil 1;
- b) Diseminasi hasil penelitian dan inovasi pendidikan dosen berbasis kemaritiman melalui *visiting lecturer* dan *invited speaker* pada perguruan tinggi di dalam negeri dan di luar negeri;
- c) Peningkatan jumlah dosen yang menjadi staf ahli di lembaga nasional dan internasional;
- d) Peningkatan jumlah dosen sebagai editor/reviewer jurnal internasional bereputasi.

3) Indikator Kinerja

- a) Meningkatnya publikasi hasil penelitian pada jurnal internasional bereputasi Quartil 1;
- b) Adanya pengakuan kompetensi bagi dosen dan hasil-hasil penelitiannya;
- c) Meningkatnya jumlah dosen yang dimanfaatkan sebagai tenaga ahli pada lembaga nasional dan internasional;
- d) Meningkatnya jumlah dosen yang dimanfaatkan sebagai editor/reviewer jurnal internasional bereputasi.

BAB VI

PENUTUP

Rencana Induk Pengembangan (RIP) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan disusun sebagai upaya pengembangan jangka panjang yang diusung oleh UPPS-KIP. Pengembangan tersebut dituntun oleh nilai-nilai kemaritiman dan jiwa *entrepreneurship* sebagai wujud pembacaan kondisi lingkungan serta tuntutan publik yang termanifestasi pada visi dan misi UPPS-KIP yakni profesional, global dan *entrepreneurship*.

Untuk menerjemahkan Rencana Induk Pengembangan ini, maka dibuat untuk jangka waktu 20 tahun serta dibagi kedalam 4 (empat) tahap pengembangannya, yaitu: Tahap 1 dimulai pada tahun 2019-2023 dengan mengusung tema Peningkatan Akses dan Sumber daya, Tahap 2 dimulai pada tahun 2024-2028 dengan tema Peningkatan kualitas caturdarma, Tahap 3 dimulai pada tahun 2029-2033 dengan tema Menjadi pusat unggulan di Kawasan Indonesia Timur, dan Tahap 4 dimulai pada tahun 2034-2038 dengan tema menjadi pusat unggulan Indonesia.

Dokumen Rencana Induk Pengembangan ini tentu akan berhadapan dengan berbagai tantangan dan hambatan dalam pelaksanaannya. Maka diperlukan adanya kebijakan yang adaptif, tata kelola handal, kompetensi sumber daya manusia yang optimal, kepemimpinan efektif, budaya akademik yang sehat, serta ditunjang jejaring kerjasama yang berkelanjutan. Rencana Induk Pengembangan 2019-2038 diharapkan dapat menjadi fondasi utama dalam membangun Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan sebagai Fakultas yang Profesional, Global dan berjiwa *entrepreneurship*.